



**DISKAN
KOTA DUMAI**

www.diskan.dumaikota.go.id


BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif


**#bangga
melayani
bangsa**


Dinas Perikanan Kota Dumai



LKPJ TAHUN 2023 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

 www.diskan.dumaikota.go.id

 0765-4300498

 [dinasperikanan.kotadumai](https://www.instagram.com/dinasperikanan.kotadumai)

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas karunia dan hidayah-Nya karena atas bimbingan dan tuntunan-Nya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2023 telah diselesaikan, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan setiap instansi pemerintah.

Laporan ini juga sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. LKPJ ini menyajikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Untuk itu diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian laporan ini kami buat, semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan kinerja serta membawa pemahaman dan pengetahuan bagi kita semua.

Dumai, 10 Januari 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI



H. APRIAGAN, S.H., M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19720412 200112 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DASTAR GAMBAR	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Visi dan Misi Kepala Daerah	3
1.4 Data Umum Daerah	4
1.4.1 Data Geografis	5
1.4.2 Jumlah Penduduk	6
1.4.3 Jumlah PNS.....	8
1.4.4 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan..	9
1.4.5 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	10
1.4 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	10
1.5 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	11
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023	13
2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah	15
2.2 Pengelolaan Belanja	16
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI	18
3.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan	18
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	18
3.1.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	34
3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan	55
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	56
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	57
BAB V PENUTUP	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Peta Administrasi Kota Dumai.....	5
2. Pembinaan dan Pendampingan pada Kelompok Nelayan	41
3. Pelatihan Laminasi Kapal Bagi Nelayan.....	41
4. Sosialisasi Pengawasan Usaha Perikanan pada Nelayan	42
5. Serah Terima Hibah Kepada Kelompok Pembudidaya Ikan	44
6. Uji Kualitas Air Menggunakan Alat Ukur Sederhana	46
7. Pelatihan Budikdamber Bagi Keluarga Beresiko Stunting.....	46
8. Pembinaan dan Pendampingan pada Kelompok Pembudidaya Ikan	48
9. Peringatan Hari Ikan Nasional di Kota Dumai Tahun 2023	49
10. Sosialisasi GEMARIKAN di TK Bunda Kreatif.....	50
11. Sosialisasi GEMARIKAN di TK Babul Khoiroh.....	50

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1. Data Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2019-2023.....	21
2. Data Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2019-2023	23

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk per Km2 Kota Dumai	7
2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Dumai.....	7
3. PNS Dinas Perikanan Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2023 .	8
4. PNS Dinas Perikanan Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2023 .	8
5. PNS Dinas Perikanan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal	9
6. Realisasi PAD Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023	9
7. Anggaran dan Realisasi Menurut Jenis Belanja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023	10
8. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Menurut Jenis Belanja pada Dinas Perikanan Kota Dumai	12
9. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023	14
10. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Perikanan Kota Dumai.....	15
11. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perikanan Kota Dumai	16
12. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023	18
13. Capaian Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023	20
14. Data Produksi Perikanan Budidaya Kota Dumai	24
15. Data KUB Nelayan Binaan Dinas Perikanan Kota Dumai	27
16. Data Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN) Binaan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023	29
17. Target dan Capaian Angka Konsumsi Ikan Kota Dumai Tahun 2017-2022 dan Perbandingan dengan Provinsi dan Nasional.....	33
18. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan.....	51

19. Kebijakan Strategis Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023	55
20. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kota Dumai Tahun Anggaran 2022	56

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai, mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah di bidang perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perikanan menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perikanan;
3. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang perikanan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas; dan
5. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai wujud akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perikanan Kota Dumai menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban Tahun 2023, meliputi hasil pelaksanaan kinerja pada Tahun Anggaran 2023, kebijakan strategis, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkenaan dengan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

1.2 DASAR HUKUM

Laporan keterangan pertanggungjawaban Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023 disusun berdasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2021 nomor 4 seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
9. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 44 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai (Berita daerah Kota Dumai Tahun 2022 nomor 22 seri D);
10. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 15 Seri A) sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 3 Seri E);

1.3 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026, Dinas Perikanan Kota Dumai menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam rencana strategis Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan rencana strategis perlu ditunjang dengan visi dan misi pembangunan Kota Dumai.

Visi menjelaskan arah atau kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi Kota Dumai Tahun 2021-2026 mempedomi Peraturan

Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Adapun visi Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu“

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Dumai sebagai kota Pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah Pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu pada sector pelayanan jasa kepelabuhan dan industri.
2. Dumai yang berbudaya melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan melayu dianggap sebagai roh pembangunan Kota Dumai dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanta sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.
3. Tahun 2026 merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026, perlu didukung dengan misi. Adapun misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhan dan industri
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berjiwa melayu

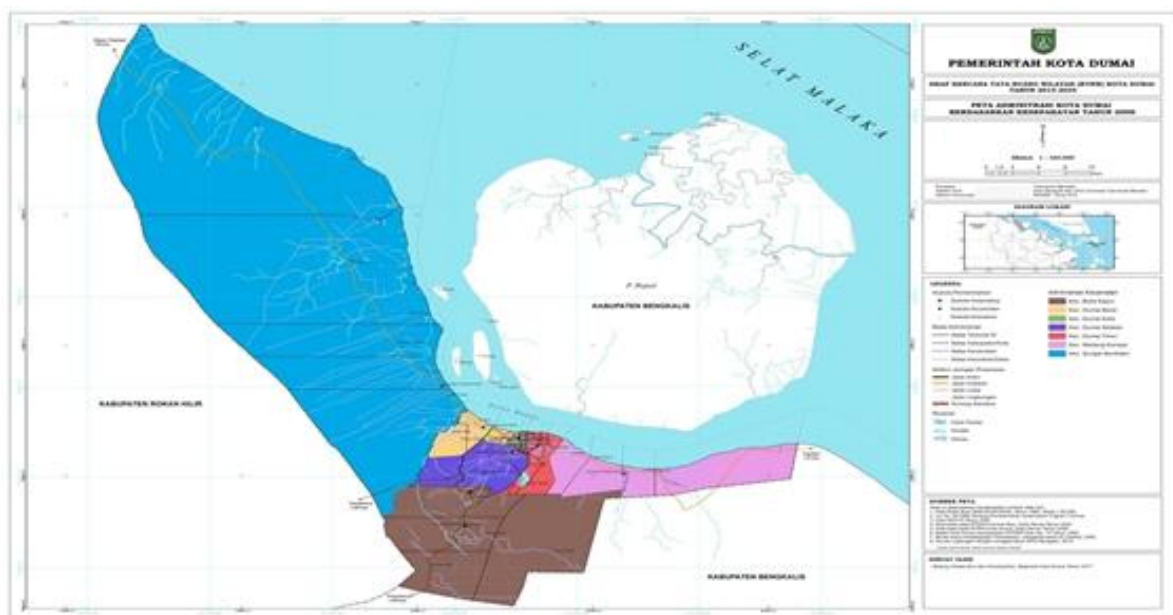
3. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik

1.4 DATA UMUM DAERAH

1.4.1 DATA GEOGRAFIS

Dumai merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Riau dan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai. Kota Dumai terletak pada posisi antara 01°26'50" - 02°15'40" Lintang Utara dan 101°0'38" - 101°43'33" Bujur Timur. Kota Dumai memiliki luar wilayah 2.066,72 Km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis
4. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Bangko, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Rimba Melintang, dan Kecamatan Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir.



Gambar 1. Peta Administrasi Kota Dumai
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Dumai (2023)

Kota Dumai terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dan 36 kelurahan, dengan kecamatan terluas adalah kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Dumai Kota dengan kecamatan terkecil. Sebagian wilayah terdiri dari dataran rendah dibagian Utara dan dataran tinggi di bagian Selatan. Terdapat 53 sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai. Dari ke 53 sungai tersebut, ada 3 (tiga) sungai terpanjang yaitu, Sungai Bulu Hala, Sungai Senepis, dan Sungai Mesjid.

Umumnya, struktur tanah terdiri dari tanah *podsolik* merah kuning dari bantuan endapan dan alluvial serta tanah organosol dan *gley* humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Secara topografi, Kota Dumai berada pada lahan gambut dengan kedalaman 0 – 0.5 m dengan ketinggian rata-rata berkisar 2 meter di atas permukaan laut. Kota Dumai beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 20.5°C – 35.8°C dan terdapat 2 (dua) musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.

1.4.2 JUMLAH PENDUDUK

Jumlah penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumberdaya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan.

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk, sehingga akan diketahui kebutuhan dasar penduduk. Jumlah penduduk di Kota Dumai secara umum mengalami pertambahan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk dapat dilihat dari laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya.

Pada pertengahan tahun 2022, jumlah penduduk Kota Dumai adalah sebanyak 331.832 Jiwa. Jumlah penduduk Kota Dumai mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebanyak 8.380 Jiwa. Sementara itu, rasio jenis kelamin penduduk Kota Dumai pada tahun 2022 sebesar 105.

Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk di Kota Dumai tahun 2022 mencapai 161 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Dumai Kota, yaitu sebesar 7.695 jiwa/km² dan kepadatan terendah di Kecamatan Sungai Sembilan yaitu sebesar 32 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk per Km² Kota Dumai

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Bukit Kapur	54.734	2,98	161
2	Medang Kampai	18.512	4,94	113
3	Sungai Sembilan	45.298	4,13	32
4	Dumai Barat	46.198	2,09	1.278
5	Dumai Selatan	54.276	1,35	821
6	Dumai Timur	72.106	2,24	2.030
7	Dumai Kota	40.708	-0,20	7.695
Dumai		331.832	2.17	161

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Dumai (2023)

Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Dumai paling banyak berada pada kelompok umur 0-4 tahun dan paling sedikit pada kelompok umur 75 tahun ke atas, dengan jumlah masing-masing sebesar 34.761 jiwa dan 2.759 jiwa. Data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Dumai

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	17.874	16.887	34.761
2	5-9	15.883	14.989	30.872
3	10-14	14.743	13.939	28.682
4	15-19	14.387	13.329	27.716
5	20-24	14.822	13.554	28.376
6	25-29	14.676	13.912	28.588
7	30-34	13.876	13.389	27.265
8	35-39	13.466	12.911	26.377
9	40-44	12.124	11.851	23.975
10	45-49	10.752	10.047	20.799
11	50-54	8.398	8.109	16.507
12	55-59	7.057	6.794	13.851
13	60-64	5.228	5.090	10.318
14	65-69	3.595	3.550	7.145

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
15	70-74	2.033	1.808	3.841
16	75+	1.287	1.472	2.759
Dumai		170.201	161.631	331.832

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Dumai (2023)

1.4.3 JUMLAH PNS

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perikanan didukung dengan 18 orang Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari golongan IV, golongan III dan golongan II, dengan perincian sebagai berikut (Tabel 3).

Tabel 3. PNS Dinas Perikanan Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2023

No	Golongan Ruang	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Golongan IV	3	16,67
2	Golongan III	14	77,78
3	Golongan II	1	5,55
Jumlah		18	100

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Dinas Perikanan di dominasi oleh golongan III sejumlah 14 orang. Berdasarkan jabatan dan eselon, Dinas Perikanan Kota Dumai terbagi menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf/Non Struktural. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4. PNS Dinas Perikanan Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2023

No	Golongan Ruang	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Eselon II	1	5,55
2	Eselon III	3	16,67
3	Eselon IV	5	27,78
4	Pejabat Fungsional	5	27,78
5	Staf/Non Struktural	4	22,22
Jumlah		18	100

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Tingkatan pendidikan pegawai Dinas Perikanan Kota Dumai juga dilihat pada gambaran umum organisasi. Walaupun tingkat pendidikan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja Dinas Perikanan, namun hal tersebut menjadi syarat dasar ketetapan penerimaan PNS. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. PNS Dinas Perikanan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Strata II (S-2)	5	27,78
2	Strata I (S-1)	12	66,67
3	SLTA Sederajat	1	5,55
Jumlah		18	100

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

1.4.4 REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN

Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan di daerah. Pendapatan daerah berperan untuk melaksanakan perencanaan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Unsur-unsur pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dinas Perikanan merupakan salah satu perangkat daerah yang menghasilkan PAD yang bersumber dari retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan. Target PAD Dinas Perikanan yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 26.300.000,- atau sebesar 105.2%. Hal ini meningkat sebesar 1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Realisasi PAD Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023

No	Tahun	Target (Rp)	Realiasi (Rp)	Persentase
1	2022	25.000.000	26.009.600	104,04%
2	2023	25.000.000	26.300.000	105,2%

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Pencapaian PAD melebihi dari target yang telah ditetapkan didukung oleh perbaikan sarana dan prasarana di UPT Balai Benih Ikan Air Tawar di Bagan Besar. Pada tahun 2023, pengadaan indukan lele dan nila juga

dilakukan untuk meningkatkan produksi. Selain itu kecukupan pakan untuk proses budidaya sudah terpenuhi dengan baik.

1.4.5 REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek belanja daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD, meliputi belanja operasi dan belanja modal.

Secara keseluruhan, anggaran belanja Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2023 adalah sebesar Rp. 8.056.889.679,- (delapan milyar lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 7.754.853.716,57 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah lima puluh tujuh sen) atau sebesar 96,25%. Adapun rincian dan realisasi anggaran belanja Dinas Perikanan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut (Tabel 7)

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Menurut Jenis Belanja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	Belanja			
5.1	Belanja Operasi	7.397.327.473	7.108.879.518,57	96,10
5.1.01	Belanja Pegawai	3.187.283.500	2.968.818.145	93,18
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.535.979.628	3.481.145.123,57	98,45
5.1.05	Belanja Hibah	674.064.345	657.916.250	97,60
5.2	Belanja Modal	659.559.206	645.974.198	97,94
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	411.277.270	398.337.000	96,85
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	248.281.936	247.637.198	99,74
	Total	8.056.886.679	7.754.853.716,57	96,25

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Berdasarkan Tabel 7, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran pada tahun 2023 mencapai 96,25%. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran 2022, yaitu Rp. 7.436.540.150 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu seratus lima puluh rupiah) atau sebesar 94,41%, terjadi peningkatan signifikan realisasi anggaran pada tahun 2023.

Walaupun realisasi anggaran tidak tercapai 100%, namun secara pengelolaan keuangan sudah cukup optimal. Berikut penjelasan dari masing-masing komponen belanja

1. **Belanja operasi** merupakan pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja operasi dirinci atas jenis, yaitu (1) belanja pegawai, (2) belanja barang dan jasa, (3) belanja bunga, (4) belanja subsidi, (5) belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Sesuai dengan anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai, belanja operasi Dinas Perikanan Kota Dumai terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah. Pada tahun 2023, realisasi belanja pegawai Dinas Perikanan adalah sebesar Rp. 2.968.818.145 atau menurun sebesar 7% dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh terjadinya mutasi dan pegawai yang pensiun di lingkungan Dinas Perikanan Kota Dumai. Namun, untuk realisasi belanja barang dan jasa terjadi peningkatan sebesar 39% pada tahun 2023, yaitu sebesar Rp. 3.481.145.123,57. Realisasi belanja hibah pada tahun 2022 dianggarkan untuk 7 kelompok sebesar Rp.547.560.000,- dan hal tersebut meningkat pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp 657.916.250 untuk 10 kelompok. Anggaran hibah diperuntukkan untuk kelompok pembudidaya ikan binaan Dinas Perikanan yang sebelumnya telah dilakukan verifikasi dan validasi lapangan untuk kelompok penerima hibah. Pada tahun 2022, Dinas Perikanan Kota Dumai memberikan bantuan sosial kepada nelayan dan kelompok pembudidaya ikan yang terkena dampak inflasi. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Pada tahun 2023, belanja bantuan sosial tidak dianggarkan lagi mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kota Dumai.

2. **Belanja Modal.** Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Pada tahun 2023, belanja modal Dinas Perikanan Kota Dumai terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal gedung dan bangunan. Belanja modal tahun 2023 fokus kepada UPT Benih Ikan Air Tawar dan UPT Budidaya Air Payau Tabel 8. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Dinas Perikanan Kota Dumai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Menurut Jenis Belanja pada Dinas Perikanan Kota Dumai

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	
		2022	2023	2022	2023
5	Belanja				
5.1	Belanja Operasi	7.665.224.645	7.397.327.473	7.245.838.150	7.108.879.518,57
5.1.01	Belanja Pegawai	3.335.262.255	3.187.283.500	3.047.806.860	2.968.818.145
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.610.972.390	3.535.979.628	2.513.263.190	3.481.145.123,57
5.1.05	Belanja Hibah	565.380.000	674.064.345	547.560.000	657.916.250
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.153.610.000	-	1.137.208.100	-
5.2	Belanja Modal	211.863.600	659.559.206	190.702.000	645.974.198
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	211.863.600	411.277.270	190.702.000	398.337.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	248.281.936	-	247.637.198
	Total	7.877.088.245	8.056.886.679	7.436.540.150	7.754.853.716,57

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2023

Kebijakan umum keuangan daerah pada dasarnya merupakan bagian dari pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Daerah. Tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang direncanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Disamping itu, untuk menerapkan kesepakatan antara DPRD Kota Dumai dan Pemerintah Daerah Kota Dumai terhadap prioritas yang perlu dicapai dan ditingkatkan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2023 yang kemudian dibahas kembali dengan penyesuaian terhadap isu strategis yang berkembang, kemudian untuk dapat menjadi kegiatan dengan urutan prioritas, maka harus ditetapkan Strategis dan Prioritas Belanja Daerah.

Strategis dan prioritas belanja daerah tahun anggaran 2023 diperlukan dalam rangka merumuskan langkah-langkah dalam mencapai arah dan kebijakan umum APBD. Mengingat kapasitas sumber daya yang dimiliki masih terbatas, sehingga diperlukan adanya penentuan strategi dan pemilihan prioritas dalam upaya pencapaian arah kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kota Dumai.

Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Dinas Perikanan Kota Dumai dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 161, perubahan anggaran dapat dilakukan jika:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan darurat; dan/atau
4. Keadaan luar biasa.

Berdasarkan Tabel 7, penyerapan anggaran adalah sebesar 96,25% atau sebesar Rp. 7.754.853.716,57,- dengan kategori sangat tinggi. Anggaran tersebut dialokasikan ke dalam 4 (empat) program, 11 dan 26 Sub Kegiatan. Pada Tahun 2023, pagu awal Dinas Perikanan Kota Dumai adalah sebesar Rp. 6.954.063.347 yang dialokasikan untuk belanja operasi dan belanja modal. Pada Januari 2023, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 263.635.280,- menjadi Rp. 7.217.698.627,- yang dialokasikan untuk kenaikan honorarium penyuluh non PNS, honorarium petugas pembenihan dan pemeliharaan ikan BBI, pembayaran BPJS non PNS baik itu kecelakaan kerja maupun kematian, serta perbaikan electrical di UPT Benih Ikan Air Tawar.

Namun, pada bulan September 2023 penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2023, Dinas Perikanan mendapat pagu tambahan sebesar Rp. 839.188.052,- sehingga pagu anggaran Dinas Perikanan menjadi Rp. 8.056.556.679. Secara ringkas, dapat dilihat pada Tabel 9. Penambahan tersebut berupa:

1. **Belanja pegawai.** Pada perubahan tahun anggaran 2023, terjadi penyesuaian anggaran pada belanja pegawai. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian gaji dan tunjangan kinerja pada PNS Dinas Perikanan, baik itu pejabat struktural, pejabat fungsional maupun staf.
2. **Belanja barang dan jasa.** Pada jenis belanja ini terjadi penambahan sebesar Rp. 907.319.000. Penambahan tersebut dilakukan untuk penyesuaian gaji TKPK penyuluh non PNS dan petugas pembenihan dan pemeliharaan ikan di UPT Benih Ikan Air Tawar, perbaikan gedung kantor Dinas Perikanan, dan memenuhi kebutuhan rutin dinas yang belum terpenuhi selama 12 bulan.
3. **Belanja Modal** juga terjadi penambahan sebesar Rp. 115.322.000,- yang diperuntukkan untuk membeli handtraktor, timbangan duduk, mesin pembuatan pakan ikan kapasitas kecil, dan pembangunan prasarana pendukung budidaya ikan di UPT Benih Ikan Air Tawar.

Tabel 9. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH		
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.000.000	25.000.000
4	1	02	Retribusi Daerah	25.000.000	25.000.000
Jumlah Pendapatan				25.000.000	25.000.000
5			BELANJA DAERAH		
5	1		BELANJA OPERASI	6.399.826.341	7.665.224.645
5	1	01	Belanja Pegawai	3.107.101.368	3.187.283.500
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.618.660.628	3.525.979.628
5	1	05	Belanja Hibah	674.064.345	674.064.345
5	2		Belanja Modal	554.237.006	669.559.206
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	352.725.270	421.277.270
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.281.936	248.281.936
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.229.800	0
Jumlah Belanja				6.954.063.347	8.056.886.679

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

2.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Dinas Perikanan merupakan salah satu perangkat daerah di Kota Dumai yang menghasilkan pendapatan dari retribusi penjualan benih ikan. Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, target PAD yang ditetapkan untuk Dinas Perikanan Kota Dumai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Berdasarkan laporan realisasi anggaran (LRA), realisasi pendapatan Dinas Perikanan Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 26.300.000,- atau sebesar 105,20 dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi peningkatan sebesar 1,12% dari realisasi pendapatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Perikanan Kota Dumai

Kode Rek	Uraian	2022 (ribu rupiah)		%	2023 (ribu rupiah)		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
4	Pendapatan Daerah	25.000	26.009,6	104,04	25.000	26.300	105.02
4.1	Pendapatan Asli Daerah	25.000	26.009,6	104,04	25.000	26.300	104,04

Kode Rek	Uraian	2022 (ribu rupiah)		%	2023 (ribu rupiah)		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
4.1.02	Retribusi Daerah	25.000	26.009,6	104,04	25.000	26.300	104,04
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	25.000	26.009,6	104,04	25.000	26.300	104,04

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

2.2 PENGELOLAAN BELANJA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pada Dinas Perikanan, pengelolaan belanja hanya diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja hibah. Sedangkan belanja modal terdiri dari 2 (dua), yaitu belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal gedung dan bangunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 11 di bawah ini.

Realisasi belanja daerah pada tahun 2023 adalah Rp 7.754.853.716,57 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah lima puluh tujuh sen) atau sebesar 96,25% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil persentase, diketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Perikanan sudah cukup optimal.

Tabel 11. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perikanan Kota Dumai

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	Belanja			
5.1	Belanja Operasi	7.397.327.473	7.108.879.518,57	96,10
5.1.01	Belanja Pegawai	3.187.283.500	2.968.818.145	93,18
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.535.979.628	3.481.145.123,57	98,45
5.1.05	Belanja Hibah	674.064.345	657.916.250	97,60
5.2	Belanja Modal	659.559.206	645.974.198	97,94

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	411.277.270	398.337.000	96,85
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	248.281.936	247.637.198	99,74
Total		8.056.886.679	7.754.853.716,57	96,25

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, meliputi:

1. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan
2. Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya
3. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Tahun anggaran sebelumnya.

3.1 PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, cakupan bina kelompok nelayan, cakupan bina kelompok budidaya, dan angka konsumsi ikan. Indikator tersebut merupakan parameter keberhasilan kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai dalam penyelenggaraan fungsi bidang kelautan dan perikanan. Adapun capaian indikator kinerja utama Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2022	2023		Persentase Capaian
			Realisasi	Target	Realisasi	
1	Produksi Perikanan Tangkap	ton	1.020,3	742	1.057,43	142,51%
2	Produksi Perikanan Budidaya	ton	382,69	308	344,07	111,71%
3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	kelompok	18	20	23	115%
4	Cakupan Bina Kelompok Budidaya	kelompok	31	34	47	138,23%

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2022	2023		Persentase Capaian
			Realisasi	Target	Realisasi	
5	Angka Konsumsi Ikan	Kg/ kapita/ tahun	49,64	42	N/A	N/A

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Berdasarkan Tabel 12, dapat dilihat bahwa data yang disajikan belum sepenuhnya terpenuhi, karena masih menunggu validasi dari provinsi dan pusat, seperti angka konsumsi ikan. Sedangkan data produksi perikanan tangkap dan budidaya baru tervalidasi sampai dengan bulan Oktober 2023.

IKU 1 PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

Produksi perikanan tangkap merupakan hasil tangkapan ikan yang dilakukan di perairan laut dan perairan umum baik yang didaratkan di pelabuhan maupun non pelabuhan. Data disajikan dalam satuan ton. Khusus Kota Dumai, produksi perikanan tangkap merupakan hasil penangkapan ikan di laut, bukan di perairan umum daratan (PUD). Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut

$$\text{Produksi} = \text{fraksi sampel} \left(\frac{N}{n} \right) \times \text{produksi sampel} (p)$$

dimana:

N = Jumlah alat penangkapan ikan per stratifikasi dalam satu kab/kota

n = sampel setiap stratifikasi alat penangkapan ikan

p = produksi sampel perikanan tangkap

Produksi perikanan tangkap memiliki peran penting terhadap komoditas perikanan laut terhadap pasokan ikan di Kota Dumai. Jenis ikan hasil tangkapan yang diperoleh nelayan bervariasi, seperti Acang-acang bombay atau yang dikenal dengan nama ikan Lomek, Bawal Putih, Belanak, Bulu Ayam, Gemprang, Golok-Golok, Gulamah, Hiu Pilus, Kakap, Kerapu Batik, Senangin, Layur, Manyung Besar, Pari Kembang, Pucuk Nipah, Rajungan, Sembilang, Tenggiri Papan, Tetengkek, Udang Harimau, Udang Orang, dan Udang Putih. Capaian produksi perikanan tangkap tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 13. Capaian Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023

No	Jenis Ikan	Produksi (Kg)	
		2022	2023
1	Acang-acang Bombay (<i>Harpadon nehereus</i>)	201.051	261.736
2	Bawal Putih (<i>Pampus argenteus</i>)	4.307	1.309
3	Belanak (<i>Mugil cephalus</i>)	1.243	775
4	Bulu Ayam (<i>Thryssa hamiltonii</i>)	37.155	65.154
5	Gemprang (<i>Ilisha elongata</i>)	166.302	179.927
6	Golok-golok (<i>Chirocentrus dorab</i>)	56.903	33.062
7	Gulamah (<i>Gymnocranius griseus</i>)	11.546	3.073
8	Hiu Pilus (<i>Rhizoprionodon acutus</i>)	-	1.891
9	Kakap (<i>Liopropoma randalli</i>)	57.009	48.045
10	Kerapu Batik (<i>Epinephelus polyphekadion</i>)	2.979	329
11	Kuro; Senangin (<i>Eleutheronema tetradactylum</i>)	87.120	78.677
12	Layur (<i>Trichiurus lepturus</i>)	10.052	24.105
13	Manyung Besar (<i>Netuma thalassina</i>)	82.514	75.444
14	Pari Kembang (<i>Neotrygon kuhlii</i>)	38.016	20.749
15	Pucuk Nipah (<i>Muraenesox bagio</i>)	1.900	6.485
16	Rajungan (<i>Portunus pelagicus</i>)	25.576	827
17	Sembilang Betul (<i>Plotosus canius</i>)	44.928	52.197
18	Tenggiri Papan (<i>Scomberomorus guttatus</i>)	82.477	89.300
19	Tetengkek (<i>Megalaspis cordyla</i>)	49.913	29.980
20	Udang Harimau (<i>Parapenaeopsis sculptilis</i>)	1.866	8.839
21	Udang Orange (<i>Atypopenaeus formosus</i>)	38.160	43.329
22	Udang Putih; Udang Api-api (<i>Metapenaeus eboracensis</i>)	19.283	32.200
Total		1.020.300	1.057.433

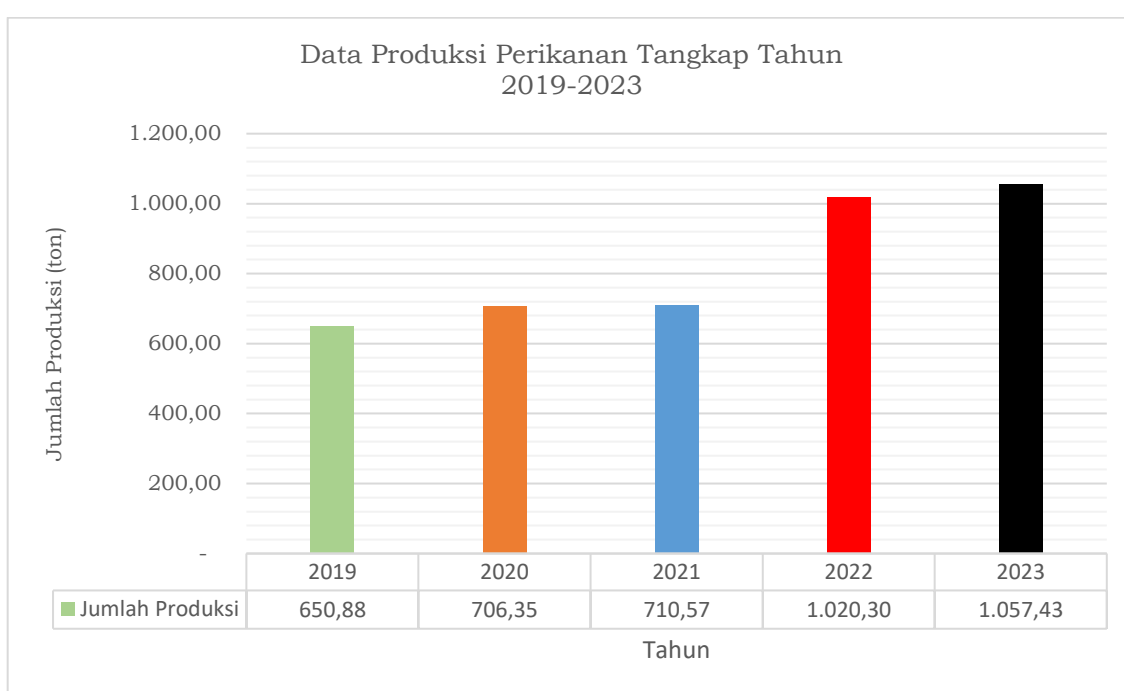
Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Berdasarkan Tabel 16, diketahui bahwa produksi perikanan tangkap Kota Dumai masih didominasi dengan ikan Acang-acang bombay atau yang lebih dikenal dengan ikan lomek dan ikan Gemprang atau lebih dikenal dengan nama ikan Puput. Ikan lomek merupakan ikan khas Kota Dumai yang biasa dikonsumsi dalam bentuk ikan segar maupun yang dikeringkan. Ikan lomek hidup diperairan laut, payau maupun lepas pantai yang berlumpur atau berpasir dengan kedalaman 50 meter. Tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap ikan lomek menjadikan ikan tersebut sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomis yang potensial.

Produksi perikanan tangkap tahun 2023 berdasarkan data adalah sebesar 1.057,43 ton atau mencapai 142,51% dari target tahun 2023. Apabila dilihat pada Tabel 16 di atas, terdapat 4 (empat) jenis ikan yang menurun signifikan hasil tangkapannya, seperti Bawal Putih, Gulamah, Kerapu Batik, dan Rajungan. Hal ini bisa terjadi karena akibat dari dampak perubahan

iklim memicu musim ikan yang tidak menentu. Namun penurunan produksi dari beberapa jenis ikan ini, tidak mempengaruhi terhadap capaian indikator kinerja produksi perikanan tangkap.

Produksi perikanan tangkap diukur, divalidasi dan dilaporkan secara berkala setiap semester. Jika dibandingkan dengan data 4 (empat) tahun sebelumnya, terjadi peningkatan data produksi perikanan tangkap. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan produksi perikanan tangkap, yaitu (1) teknologi tepat guna, (2) penyuluhan, (3) bantuan pemerintah, dan (4) lama melaut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 1 di bawah ini



Grafik 1. Data Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2019 – 2023
 Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Selama melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut, terdapat kendala yang selalu dihadapi oleh nelayan, yaitu sebagai berikut:

1. Naiknya harga BBM bersubsidi, sehingga menyebabkan biaya operasional untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut juga meningkat
2. Cuaca dan gelombang tinggi pada akhir tahun 2023.

Ada beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mendorong produksi perikanan tangkap, antara lain:

1. Koordinasi dengan PT. Pertamina untuk mendapatkan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan.
2. Mempermudah akses pendanaan dan pemodalannya bagi nelayan untuk operasional melaut, baik melalui program KUR, Kredit Mikro, dan kredit program lainnya.
3. Penyaluran bantuan pemerintah, baik kabupaten/kota, provinsi maupun pusat untuk nelayan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap antara lain:

1. Pembinaan dan pendampingan bagi kelompok nelayan
2. Pelatihan nelayan berupa laminasi kapal yang diikuti oleh KUB binaan Dinas Perikanan Kota Dumai. Kegiatan pelatihan ini bekerjasama dengan Politeknik KP Dumai.
3. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait wewenang kabupaten/kota dalam pemberdayaan nelayan. Hasil koordinasi tersebut menghasilkan keputusan bahwa kabupaten/kota bisa memberikan bantuan kepada nelayan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Hal ini didukung dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

IKU 2 PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

Produksi perikanan budidaya merupakan pengumpulan data dari semua hasil pembudidayaan ikan yang dipelihara, dibesarkan, dan/atau dibiakkan serta dipanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan, yang sebagian besar untuk dijual, termasuk jumlah ikan yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau yang diberikannya kepada pekerja sebagai upah. Satuan yang digunakan dalam bentuk ton. Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Produksi} = \text{fraksi sampel} \left(\frac{N}{n} \right) \times \text{produksi sampel} (p)$$

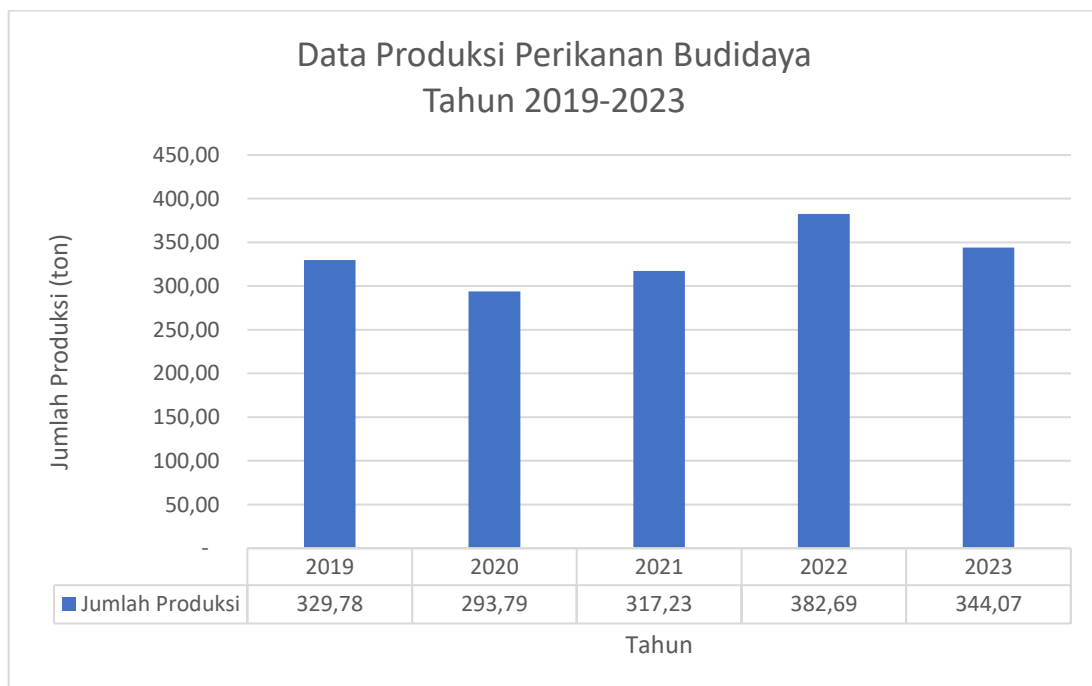
dimana:

N = Jumlah jenis pembesaran ikan per stratifikasi dalam satu kab/kota

n = sampel setiap stratifikasi pembesaran ikan

p = produksi sampel perikanan budidaya

Capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 adalah sebesar 344,07 ton dan jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yakni sebesar 308 ton, maka capaian produksi perikanan budidaya adalah sebesar 111,71%. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi tahun 2022 yakni sebesar 382,69 ton. Adapun data produksi perikanan budidaya selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada Grafik 2 di bawah ini.



Grafik 2. Data Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2019 – 2023
Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Berdasarkan Grafik 2 di atas, pencapaian data produksi perikanan budidaya tertinggi adalah pada tahun 2022 dengan total produksi sebesar 382,69 ton dan terendah pada tahun 2020 dengan total produksi sebesar 293,79 ton. Ada 7 (tujuh) komoditas, yang menyumbang hasil produksi pada tahun 2022, yaitu Nila, Gurami, Lele, Patin, Bawal, Bandeng, dan Udang Vanname. Penurunan produksi pada tahun 2020 disebabkan karena di

Indonesia, khususnya di Kota Dumai terkena pandemic Covid-19. Pada tahun 2023, total produksi sebesar 344,07 ton. Jika dibandingkan dengan data tahun 2022, terjadi penurunan sebesar 38,62 ton atau penurunan sebesar 10,09%. Adapun rincian data produksi perikanan budidaya tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 14. Data Produksi Perikanan Budidaya Kota Dumai

No	Jenis Ikan	Produksi (Kg)	
		2022	2023
1	Nila	17.230	9.000
2	Gurami	2.462	1.300
3	Lele	260.641	233.574
4	Patin	3.485	2.125
5	Bawal	5	-
6	Bandeng	247	-
7	Udang Vanname	98.624	97.933
8	Kepiting	-	40
Total		382.694	344.072

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Berdasarkan Tabel di atas, ada 6 (enam) jenis yang menjadi prioritas utama penyumbang data produksi perikanan budidaya, yaitu nila, gurami, lele, patin, udang vanname dan kepiting. Dari keenam komoditas tersebut, lele merupakan penyumbang terbesar produksi perikanan budidaya di Kota Dumai yaitu sebesar 233.574 kg. Budidaya ikan lele sangat menguntungkan jika dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek pemanfaatan lahan. Budidaya ikan lele dapat memanfaatkan lahan kritis yang tidak bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Ikan lele dapat hidup diperairan yang minim dan kualitas air yang kurang baik.
2. Aspek teknologi. Budidaya ikan lele tidak membutuhkan teknologi yang mutakhir. Yang diperlukan adalah tekun dan telaten.
3. Aspek ekonomi. Budidaya ikan lele tidak memerlukan modal yang besar, sehingga dapat dilakukan pada skala rumah tangga. Hasil dari budidaya ikan lele dapat dijual ataupun dikonsumsi sendiri sebagai pemenuhan gizi keluarga.
4. Aspek sosial. Ikan lele merupakan komoditas yang dapat diterima oleh masyarakat banyak.

Selain lele, udang vanname sebagai penyumbang produksi perikanan budidaya terbesar ke dua di Kota Dumai. Saat ini budidaya udang merupakan suatu peluang usaha yang menjanjikan oleh banyak orang. Hal ini dikarenakan udang sebagai salah satu komoditas yang banyak diminati oleh pasar global. Modal dan biaya produksi yang diperlukan untuk budidaya udang sangat besar. Walaupun begitu, keuntungan minimal yang diterima adalah sebesar 30%. Jika dibandingkan dengan data tahun 2022, terjadi penurunan produksi udang vanname sebesar 31% pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan oleh infeksi penyakit. Infeksi penyakit dapat menyebabkan terjadinya kematian masal, dan jika dibiarkan akan merugikan petambak. Keparahan infeksi penyakit pada udang bergantung pada kondisi wilayah budidaya, waktu budidaya dan musim.

Mendeteksi udang yang terkena penyakit cukup sulit untuk dilakukan secara langsung, sehingga perlu dilakukan uji laboratorium sampel udang yang memiliki gejala terserang penyakit. Pada umumnya, petambak mengobati udang yang terkena penyakit dengan memberikan antibiotik. Namun saat ini, penggunaan antibiotik dilarang karena dapat menyebabkan resisten patogen terhadap antibiotik dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Ada beberapa cara petambak mengatasi kematian dini akibat terserang penyakit, yaitu sebagai berikut:

1. Jika ada udang yang terkena penyakit, semua udang dalam satu kolam diangkat dan dimatikan. Udang yang sudah mati harus langsung dibersihkan dari kolam agar tidak terjadinya penularan penyakit ke kolam lain. Segera lakukan pengeringan dan disinfeksi kolam supaya patogen penyebab penyakit mati, tidak menular ke udang yang lain.
2. Membesarkan udang yang tersisa sampai size tertentu agar harganya bisa lebih naik. Namun, solusi ini hanya berlaku pada gejala yang tidak cukup serius dan masih bisa dilanjut siklusnya.

Selain cara di atas, ada beberapa rekomendasi cara mencegah udang vanname mati dini akibat penyakit, yaitu sebagai berikut.

1. Memilih induk udang yang terbaik.
2. Menjaga kebersihan fasilitas tambak

3. Mengimplementasikan biosekuriti. Biosekuriti merupakan Tindakan pencegahan masuknya inang penyakit agar lingkungan tambak terkontrol dengan maksimal dan bebas dari penyakit.

IKU 3 CAKUPAN BINA KELOMPOK NELAYAN

Cakupan bina kelompok nelayan merupakan jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah daerah dibagi dengan target pada tahun berkenaan dan dikalikan dengan seratus persen. Cakupan bina kelompok nelayan merupakan persentase kelompok binaan Dinas Perikanan Kota Dumai pada tahun berkenaan yang mendapatkan pembinaan, pendampingan serta bantuan dari pemerintah daerah untuk tumbuh, berkembang dan meningkatkan pendapatan. Kelompok binaan nelayan dikenal dengan nama kelompok usaha bersama (KUB)

KUB nelayan merupakan kelompok yang dibentuk oleh berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/2021 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, syarat pembentukan KUB adalah sebagai berikut.

1. Memiliki jumlah anggota kelompok 10-25 orang
2. Pelaku utama yang berada di dalam lingkungan pengaruh seorang ketua kelompok
3. Mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha perikanan
4. Memiliki kesamaan dalam tradisi/kebiasaan, domisili, lokasi usaha, status ekonomi dan Bahasa
5. Bersifat informal
6. Memiliki saling ketergantungan antar individu
7. Mandiri dan partisipatif
8. Memiliki aturan/norma yang disepakati bersama
9. Memiliki administrasi yang rapi

Pembentukan KUB dapat memberikan manfaat bagi nelayan Kota Dumai. Adapun manfaat yang dapat diterima adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan rasa kepentingan bersama
2. Menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bersama
3. Mempermudah proses kemitraan usaha
4. Mempermudah akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan
5. Meningkatkan kemampuan pengelolaan, pengembangan dan diversifikasi usaha
6. Sebagai pemersatu aspirasi yang murni dan sehat
7. Sebagai wadah yang efektif dan efisien untuk belajar serta bekerja sama
8. Sebagai fasilitator penyampaian dan pelaksanaan kebijakan pemerintah bagi nelayan.

Pada tahun 2023, jumlah kelompok binaan sebanyak 23 kelompok. Kelompok tersebut tersebar di Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Sungai Sembilan, dan Kecamatan Dumai Barat (Tabel 15). Alat tangkap yang digunakan adalah jaring insang, rawai, sondong, pengering, dan jaring udang.

Tabel 15. Data KUB Nelayan Binaan Dinas Perikanan Kota Dumai

No.	Nama KUB	Kelurahan	Kecamatan
1	KUB Nelayan Sejahtera	Pelintung	Medang Kampai
2	KUB Medang Kampai Jaya	Pelintung	Medang Kampai
3	KUB Nelayan Bunga Mawar	Pelintung	Medang Kampai
4	KUB Mundam Jaya	Mundam	Medang Kampai
5	KUB Nelayan Tuna	Tanjung Palas	Dumai Timur
6	KUB Harapan Baru	Geniot	Sungai Sembilan
7	KUB Muara Geniot	Geniot	Sungai Sembilan
8	KUB Terbit Fajar	Basilam Baru	Sungai Sembilan
9	KUB Basilam Pesisir	Basilam Baru	Sungai Sembilan
10	KUB Lomek	Purnama	Dumai Barat
11	KUB Batu Karang	Purnama	Dumai Barat
12	KUB Maju Jaya	Lubuk Gaung	Sungai Sembilan
13	KUB Nelayan Bersatu Jaya	Lubuk Gaung	Sungai Sembilan
14	KUB Hiu Mas	Bangsai Aceh	Sungai Sembilan
15	KUB Kuda Laut	Bangsai Aceh	Sungai Sembilan

No.	Nama KUB	Kelurahan	Kecamatan
16	KUB Teluk Makmur	Teluk Makmur	Medang Kampai
17	KUB Guntung Sejati	Guntung	Medang Kampai
18	KUB Terubuk Jaya	Basilam Baru	Sungai Sembilan
19	KUB Mekar Jaya	Purnama	Dumai Barat
20	KUB Senangin	Purnama	Dumai Barat
21	KUB Sungai Sepit Berkah	Batu Teritip	Sungai Sembilan
22	KUB Sampan Dayung	Purnama	Dumai Barat
23	KUB Ikan Tenggiri	Lubuk Gaung	Sungai Sembilan

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Jika dibandingkan dengan jumlah kelompok binaan pada tahun 2022, terjadi penambahan 3 (tiga) kelompok pada tahun 2023, yaitu KUB Sungai Sepit Berkah, KUB Sampan Dayung dan KUB Ikan Tenggiri. Pada tahun ini juga, terdapat 2 (dua) KUB lama aktif kembali melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut. Kedua KUB tersebut adalah KUB Senangin dan KUB Mekar Jaya. Capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 23 kelompok atau 115% dari target yang telah ditetapkan.

Pembinaan terhadap KUB dilakukan oleh tenaga penyuluh Non PNS dan PNS bidang Kenelayanan-Dinas Perikanan. Pelaksanaan pembinaan biasanya dilakukan secara persuasif. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengertian kepada nelayan untuk sadar berkelompok. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, penumbuhan kelembagaan pelaku utama adalah proses inisiasi dan fasilitasi tumbuhnya suatu kerjasama yang bersumber dari kesadaran pelaku utama dengan cara bergabung dalam kelompok untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan prinsip kesamaan kepentingan, sumber daya alam, sosial ekonomi, keakraban, saling mempercayai dan keserasian hubungan antara pelaku utama, sehingga dapat dijadikan sebagai faktor pengikat untuk kelestarian kehidupan berkelompok.

Guna terciptanya penumbuhan kelompok atau kelembagaan pelaku utama perikanan, maka perlu dilakukan beberapa hal yang dapat

merangsang dan memotivasi masyarakat agar bisa tumbuh mandiri. Dimana, sebelumnya tanpa ada rangsangan atau motivasi, tentunya sangat sulit berkembang dan mandiri. Apalagi setiap tahunnya, pemerintah terus menggulirkan/menyalurkan bantuan atau program demi membantu masyarakat/kelompok untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan.

IKU CAKUPAN BINA KELOMPOK BUDIDAYA

Sama halnya dengan kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. Syarat pembentukan dan hal-hal lain yang perlu dilengkapi, hampir sama dengan pembentukan kelompok nelayan.

Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan merupakan jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah daerah dibagi dengan target pada tahun berkenaan dan dikalikan dengan seratus persen. Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan merupakan persentase kelompok binaan Dinas Perikanan Kota Dumai pada tahun berkenaan yang mendapatkan pembinaan, pendampingan serta bantuan dari pemerintah daerah untuk tumbuh, berkembang dan meningkatkan pendapatan.

Tabel 16. Data Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN) Binaan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023

No	Nama Kelompok	Alamat	Bidang Usaha
1	Sumber Berkah	Jl. Bagan Keladi	Pembesaran
2	Mutiara Hati	Jl. Bunga Tujuh	Pembesaran
3	Palas Jaya	Jl. Bades	Pembesaran
4	Rejo Bersama	Jl. Sri Wedari Ujung	Pembesaran
5	Al-Huda Jaya	Jl. Baru Gg. Handayani	Pembesaran
6	Sei Guntung	Jl. Lestari RT. 02 Kel. Guntung	Pembesaran
7	Cemerlang	Jl. Lestari RT. 02 Kel. Guntung	Pembesaran
8	Perwira 3	Jl. Gunung Bromo	Pembesaran
9	Putra Mandiri	Jl. Pendidikan	Pembesaran
10	Bunga Tanjung Jaya	Jl. Bunga Tanjung	Pembesaran
11	Keluarga Bunga Tanjung	Jl. Bunga Tanjung	Pembesaran
12	Pancasila Mandiri	Jl. Bukit Datuk Lama	Pembesaran
13	Gema	Jl. BBI	Pembesaran

No	Nama Kelompok	Alamat	Bidang Usaha
14	Bagan Lestari	Jl. Hidayah	Pembesaran
15	Pemuda Pancasila	Jl. Perumnas BBI	Pembesaran
16	UPR Sejahtera Bersama	Jl. BBI	Pembenihan
17	Sitolong Nadangol	Jl. Soekarno Hatta	Pembesaran
18	Nila Merah	Jl. Baru	Pembesaran
19	Mawar	Jl. Sukaramai	Pembenihan dan Pembesaran
20	Kayu Kapur Makmur	Jl. Soekarno Hatta Kel. Bukit Kayu Kapur	Pembesaran
21	Tunas Pesisir	Jl. Abdul Aziz Geniot	Pembesaran
22	Geniut Bersatu	Jl. Abdul Aziz Geniot	Pembesaran
23	Maju Bersama	Jl. Abdul Aziz Geniot	Pembesaran
24	Camar Laut	Jl. Abdul Aziz Geniot	Pembesaran
25	Windu Jaya	Jl. Abdul Aziz Geniot	Pembesaran
26	Makmur Sejahtera	Jl. Makmur	Pembesaran
27	Sepakat Jaya	Jl. Kaplingan	Pembesaran
28	Jumbo Power	Jl. Sepakat Kel. Gurun Panjang	Pembesaran
29	Amanah Jaya	Jl. Utama Kel. Kampung Baru	Pembesaran
30	Pemuda Punak	Jl. Punak, Kel. Purnama	Pembesaran
31	Berkah Jaya	Jl. Tanjung Sari Gg. Tanjung Mulia	Pembesaran
32	Kreatif	Jl. Kaharuddin Nasution No.123 Gg. Nusa Indah	Pembesaran
33	Mundam Berbakti	Jl. Muslim RT.04 Kel. Mundam	Pembesaran
34	Mina Jaya	Jl. Nakula 1 Bunga Tanjung RT.28 Kel. Bukit Datuk	Pembesaran
35	Koperasi Jasa Mandiri Jaya Lestari	Jl. Raya PU RT.021 Kel. Basilam Baru	Pembesaran
36	Mekar Tunggal	Jl. Adi Putra Tianjung	Pembesaran
37	Sumber Rizqi Perwira	Jl. Perwira Gg. Baru	Pembesaran
38	Melati Jaya	Kelurahan Tanjung Palas	Pembesaran
39	Prabu Jaya	Kelurahan Tanjung Palas	Pembesaran
40	Fastabiqul Khoirot	Jl. Siliwangi, Kelurahan Jaya Mukti	Pembesaran
41	Rindu Malam	Jl. Merdeka Baru	Pembesaran
42	Harapan Permai	Guntung	Pembesaran
43	Perintis	Jl. Dumai Pakning	Pembesaran
44	Siak Maju Bersama	Jl. Bunga Kelurahan Kampung Baru	Pembesaran
45	Lamegogo	Jl. Siak Kelurahan Kampung Baru	Pembesaran
46	Sepakat	Jl. Arifin Ahmad	Pembesaran
47	Penempul Mandiri	Sungai Geniot	Pembesaran

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Pada tahun 2023, target indikator kinerja cakupan bina kelompok budidaya adalah sebanyak 34 kelompok dengan realisasi capaian sebanyak 47 kelompok atau sebesar 138,23%. Jika dibandingkan dengan data tahun 2022, pada tahun 2023 terdapat penambahan 4 (empat) kelompok baru, yaitu POKDAKAN Melati Jaya, POKDAKAN Prabu Jaya, POKDAKAN

Fastabiqul Khoirot, dan POKDAKAN Harapan Permai, serta 12 kelompok lama aktif kembali melakukan aktivitas pembudidayaan ikan.

IKU ANGKA KONSUMSI IKAN

Sebagai sumber pangan utama, ikan memiliki kandungan gizi yang sangat baik, seperti protein, asam lemak omega 3 dan 6, vitamin, serta berbagai mineral yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan anak, ibu dan janin. Sampai dengan saat ini, Dinas Perikanan memiliki satu program yang menggalakkan masyarakat untuk mau makan ikan.

Ikan dan olahan hasil perikanan merupakan komoditas pangan sumber protein yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian. Sebagai komoditi ekonomi, ikan memiliki peranan penting dalam menghasilkan devisa negara. Untuk itu diperlukan daya saing dengan menjaga mutu dan keamanan pangan. Standarisasi keamanan produksi ikan, selain untuk meningkatkan daya saing dalam pasar duni, juga untuk menjamin kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Nilai strategis ikan dalam kontribusi ketahanan gizi nasional, meliputi:

1. Potensi produksi yang sangat besar
2. Memiliki kandungan gizi tinggi
3. Harga ekonomis
4. Keragaman jenis sangat tinggi dan tersedia sepanjang tahun
5. Ikan termasuk ke dalam *white meat* yang tingkat kolesterolnya lebih rendah dibandingkan dengan *red meat* seperti daging sapi, daging kambing, dan lain sebagainya.
6. Ikan memiliki asam amino yang lengkap
7. Kandungan lemak, vitamin, dan mineral yang sangat baik
8. Berperan penting dalam Gerakan peningkatan gizi 1000 hari pertama kehidupan.

Untuk melihat tingkat keberhasilan dari program yang dijalankan oleh Dinas Perikanan dalam meningkatkan konsumsi ikan, diperlukan indikator kinerja berupa angka konsumsi ikan. Angka konsumsi ikan merupakan jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat selama satu tahun

dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar. Ada beberapa manfaat yang didapat dari angka konsumsi ikan, yaitu sebagai berikut:

1. Menggambarkan kebutuhan ikan per jenis di masing-masing wilayah
2. Mengetahui pola konsumsi masyarakat dan analisis preferensi konsumen di suatu daerah
3. Mengetahui sumbangan ikan terhadap konsumsi pangan khususnya pangan hewani.

Adapun cara perhitungan angka konsumsi ikan dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AKI = A + B + C$$

Dimana:

- A = Konsumsi di rumah tangga
B = Konsumsi di luar rumah tangga
C = Konsumsi tidak tercatat

Catatan:

1. **Konsumsi di Rumah Tangga**, dihitung berdasarkan data susenas BPS yang dikonversi ke dalam bentuk setara utuh segar. Komponen jenis ikan yang dihitung mencakup 4 (empat) kelompok, yaitu (1) ikan dan udang segar, (2) ikan dan udang asin/diawetkan, (3) terasi/petis (bumbu-bumbuan), (4) ikan dalam kelompok makanan jadi (ikan bakar, presto, pindang, bakar, dan lain sebagainya). Data keempat komponen tersebut tidak dapat langsung dijumlahkan karena memiliki satuan yang berbeda, dan masih memerlukan faktor konversi dari ikan dalam bentuk asin/awetan, bumbu-bumbuan ke ikan dalam bentuk segar. Selain itu diperlukan juga konversi untuk ikan yang berasal dari kelompok makanan/minuman jadi dari satuan potong ke satuan kilogram
2. **Konsumsi di Luar Rumah Tangga**, memperhitungkan (1) perkembangan hotel, restoran dan katering, (2) perkembangan tamu hotel dan restoran, (3) perkembangan penyediaan menu ikan oleh catering, (4) potensi kebutuhan ikan di rumah tangga khusus, yaitu (a) orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, Lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan yang pengurusan kebutuhan

sehari-harinya dikelola oleh suatu Yayasan atau Lembaga; dan (b) kelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.

3. **Konsumsi Tidak Tercatat**, seperti produk olahan ikan berbahan surimi, seperti nugget ikan, bakso ikan, pempek, siomay, otak-otak, dan lain sebagainya.

Konsumsi ikan di Kota Dumai perlu ditingkatkan dalam mengatasi berbagai masalah gizi. Angka konsumsi ikan di Kota Dumai relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan data provinsi Riau maupun nasional. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kota Dumai, diketahui bahwa angka konsumsi ikan Kota Dumai pada tahun 2022 adalah sebesar 49,64 kg/kapita/tahun, sedangkan tahun 2023 belum diketahui nilainya karena belum divalidasi oleh DKP Provinsi Riau maupun KKP.

Tabel 17. Target Capaian Angka Konsumsi Ikan Kota Dumai Tahun 2017-2022 dan Perbandingan dengan Provinsi dan Nasional

No	Uraian	Realisasi						2023	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Ralisasi
1	Kota Dumai	40,51	40,16	45,51	44,75	45,19	49,64	42	N/A
2	Provinsi Riau	42,36	43,13	47,27	48,49	44,28	50,31		N/A
3	Nasional	47,34	50,69	55,50	54,56	58,08	59,53		N/A

Catatan: Satuannya menggunakan kg/kapita/tahun

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Masih rendahnya angka konsumsi ikan di Kota Dumai dikarenakan preferensi pilihan masyarakat kota Dumai terhadap pangan hewani lainnya dibandingkan ikan. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya angka konsumsi ikan di Kota Dumai, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman tentang gizi dan manfaat protein ikan bagi kesehatan dan kecerdasan.
2. Rendahnya suplai ikan, akibat kurang lancarnya distribusi pemasaran ikan.
3. Belum berkembangnya teknologi pengolahan/pengawetan ikan sebagai bentuk keanekaragaman dalam memenuhi selera konsumen.
4. Sarana pemasaran dan distribusi masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan konsumsi ikan di Kota Dumai, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan ikan di pasaran terutama untuk jenis ikan yang preferensinya tinggi, yaitu ikan olahan, ikan lele, dan ikan nila.
2. Penguatan distribusi dan stabilisasi harga ikan. Karena tidak semua wilayah di Kota Dumai menjadi sentra produksi perikanan, sehingga diperlukan penguatan distribusi penting untuk menjaga pasokan ikan yang merata dan pada akhirnya menjaga stabilitas harga.
3. Peningkatan aksesibilitas/keterjangkauan ikan pada rumah tangga yang konsumsi ikannya masih rendah yang mencakup tiga aspek yaitu ekonomi, fisik dan sosial. Secara ekonomi dapat ditingkatkan melalui program ikan murah melalui pengembangan pasar secara periodik pada berbagai lokasi. Secara fisik dapat dilakukan dengan (1) penyediaan infrastruktur pemasaran ikan yang menjangkau daerah-daerah yang jauh, (2) pelaksanaan even bazar ikan murah dan kampanye makan ikan, (3) pembangunan pasar ikan, serta (4) diversifikasi produk olah ikan yang variatif dengan harga terjangkau dan bentuk yang menarik. Akses sosial dapat ditingkatkan dengan (1) promosi secara konsisten dan terus menerus tentang manfaat ikan bagi kecerdasan dan kesehatan, (2) menginisiasi program bagi pemerintah untuk wajib menyajikan menu ikan pada berbagai acara mengadopsi kebijakan Kementerian Pertanian yang mewajibkan pangan lokal sebagai upaya pengenalan dan peningkatan frekuensi makan ikan.
4. Peningkatan preferensi konsumsi ikan untuk meningkatkan motivasi ikan karena budaya makan ikan di Kota Dumai belum terbentuk sehingga harus dilakukan promosi dan edukasi yang konsisten sehingga ikan dapat menjadi pilihan utama sumber protein yang dikonsumsi rumah tangga.

3.1.2 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun 2023, alokasi anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai adalah sebesar Rp. 8.056.886.679,- (delapan milyar lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.754.853.716,57 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh empat

juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah lima puluh tujuh sen) atau sebesar 96,25%. Capaian tersebut didukung oleh 4 (empat) program, 11 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Adapun uraian dari capaian tersebut adalah sebagai berikut.

PROGRAM 1 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini merupakan program yang mendukung pelaksanaan kegiatan rutin di Dinas Perikanan Kota Dumai. Pada program ini, didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 19 sub kegiatan. Pagu anggaran pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah sebesar Rp. 6.024.608.581,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.769.386.784 atau 95,76%. Adapun rinciannya dijabarkan sebagai berikut.

1. Kegiatan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 76.919.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 76.894.600,- dengan capaian sebesar 99,97%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan indikator jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Pagu anggaran adalah sebesar RP. 76.919.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 76.894.600,- atau sebesar 99,97%. Pada sub kegiatan ini, target kinerja adalah sebanyak 4 laporan dengan realisasi output sebanyak 4 laporan atau 100%.
2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan pagu anggaran adalah sebesar Rp. 3.084.263.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.866.798.145 atau sebesar 92,95%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan indikator kinerja jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas

ASN. Pada sub kegiatan ini target kinerja adalah sebanyak 22 orang/bulan dengan realisasi output sebanyak 20,45 orang/bulan atau sebesar 92,95%.

3. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.298.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 43.298.000,- atau sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sub kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD dengan indikator kinerja jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD. Pagu anggaran adalah sebesar Rp 43.298.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 43.298.000,- atau sebesar 100%. Target kinerja adalah sebesar 2 (dua) dokumen dengan realisasi output 2 (dua) dokumen atau sebesar 100%.
4. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 505.046.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 501.020.906,- atau sebesar 99,20%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 6 (enam) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan indikator kinerja jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 10.083.700 dengan realisasi anggaran sebesar 100%. Target kinerja adalah 4 (empat) paket dengan realisasi output sebanyak 4 (empat) paket.
 - b. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan indikator kinerja jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 168.978.100,- dengan realisasi anggaran Rp. 165.866.745,- atau sebesar 98,16%. Target kinerja adalah 4 (empat) paket dengan realisasi output sebanyak 4 (empat) paket.
 - c. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dengan indikator kinerja jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan. Pagu

- anggaran adalah sebesar Rp 18.590.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 18.590.000,- atau sebesar 100%. Target kinerja adalah 4 (empat) paket dengan realisasi output sebanyak 4 (empat) paket.
- d. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan indikator kinerja jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 20.985.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 20.344.010,- atau sebesar 96,95%. Target kinerja adalah 4 (empat) paket dengan realisasi output sebanyak 4 (empat) paket.
 - e. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan indikator kinerja jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 6.720.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.585.000,- atau sebesar 97,99%. Target kinerja adalah 1 (satu) dokumen dengan realisasi output sebanyak 1 (satu) dokumen.
 - f. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan indikator kinerja jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 279.690.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 279.561.451,- atau sebesar 99,95%. Target kinerja adalah 1 (satu) laporan dengan realisasi output sebanyak 1 (satu) laporan.
5. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 501.108.206,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 497.521.936,- atau sebesar 99,28%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 4 (empat) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan dengan indikator kinerja jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 125.208.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 125.160.000,- atau sebesar

- 99,96%. Target kinerja adalah sebanyak 1 (satu) unit dengan realisasi output sebanyak 1 (satu) unit atau sebesar 100%.
- b. Sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan indikator kinerja jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan dengan pagu anggaran Rp. 151.194.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 148.180.000,- atau sebesar 98.01%. Target kinerja adalah sebanyak 6 (enam) unit dengan realisasi output sebanyak 6 (enam) unit atau sebesar 100%.
 - c. Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan indikator kinerja jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 24.824.270,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.300.000,- atau sebesar 97,89%. Target kinerja adalah adalah sebanyak 4 (empat) unit dengan realisasi output sebanyak 4 (empat) unit atau sebesar 100%.
 - d. Sub kegiatan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya dengan indikator kinerja jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 199.881.336,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 199.881.336 atau sebesar 100%.
6. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.229.976.769,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.202.095.953 atau sebesar 97,73%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 3 (tiga) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan indikator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 2.535.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.530.000,- atau sebesar 99,80%. Target kinerja adalah 1 (satu) laporan dengan realisasi output sebesar 1 (satu) laporan atau sebesar 100%.
 - b. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan indikator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa

- komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 196.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 178.039.797,- atau sebesar 90,56%. Target kinerja adalah 1 (satu) laporan dengan realisasi output sebesar 1 (satu) laporan.
- c. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan indikator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 1.030.841.769,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.021.526.156,- atau sebesar 99,10%. Target kinerja adalah sebanyak 1 (satu) laporan dengan realisasi output sebanyak 1 (satu) laporan atau sebesar 100%.
7. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 583.996.306,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 581.757.244,07 atau sebesar 99,62%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 3 (tiga) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan indikator kinerja jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 141.832.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 140.700.830 atau sebesar 99,20%. Target kinerja adalah sebanyak 9 (sembilan) unit dengan realisasi output sebanyak 9 (sembilan) unit atau sebesar 100%.
 - b. Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan indikator kinerja jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Pagu anggaran sebesar Rp. 32.680.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.673.770,- atau sebesar 99,98%. Target kinerja adalah sebanyak 8 (delapan) unit dengan realisasi output sebanyak 8 (delapan) unit atau sebesar 100%.
 - c. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan indikator kinerja jumlah gedung kantor

dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 409.483.506,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 408.382.644,07 atau sebesar 99,73%. Target indikator kinerja adalah sebanyak 4 (empat) unit dengan realisasi output sebanyak 4 (empat) unit.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota tidak ada kendala yang mengganggu proses pelaksanaan. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aliran kas yang telah ditetapkan. Pengadaan kebutuhan kantor telah dilakukan secara e-katalog. Begitu juga dengan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

PROGRAM 2 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan selanjutnya adalah program pengelolaan perikanan tangkap. Pagu anggaran pada program ini adalah sebesar Rp. 213.726.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 206.674.265 atau sebesar 96,70%. Program pengelolaan perikanan tangkap ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota, dengan pagu anggaran adalah sebesar Rp. 213.726.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 206.674.265,- atau sebesar 96,70%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut
 - a. Sub kegiatan pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil dengan indikator kinerja jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 213.726.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 206.674.265,- atau sebesar 96,70%. Target indikator kinerja adalah sebanyak 18 kelompok dengan realisasi output sebanyak 18 kelompok atau 100%. Pada sub kegiatan ini, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah (1) pembinaan dan pendampingan kelompok

nelayan, (2) pelatihan laminasi kapal bagi nelayan, dan (3) pengawasan usaha perikanan. Kegiatan ini ditujukan kepada kelompok nelayan binaan Dinas Perikanan Kota Dumai.



Gambar 2. Pembinaan dan Pendampingan pada Kelompok Nelayan
Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)



Gambar 3. Pelatihan Laminasi Kapal Bagi Nelayan
Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai



Gambar 4. Sosialisasi Pengawasan Usaha Perikanan pada Nelayan
Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai

Dalam pelaksanaan sub kegiatan ini, terdapat permasalahan yang dihadapi, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak melakukan updating data perikanan tangkap. Data tersebut berupa data kelompok nelayan, jumlah nelayan, alat tangkap yang digunakan, dan armada yang dimiliki.
2. Tidak memiliki *time table* pembinaan dan pendampingan
3. Pelatihan laminasi kapal untuk nelayan dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Selalu melakukan updating data minimal 2 (dua) kali dalam setahun. Hal ini dilakukan agar data yang akan dipublikasi nantinya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Penyuluh PNS maupun penyuluh non PNS harus menyusun *time table* kegiatan pembinaan dan pendampingan. Kegiatan tersebut harus dimonitoring dan evaluasi per triwulan untuk melihat capaian kinerja dari pembinaan dan pendampingan kelompok nelayan
3. Jika ingin melaksanakan kegiatan dengan melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga, hal yang harus diperhatikan adalah harus memiliki jadwal pelatihan yang telah ditetapkan oleh pihak ketiga. Jadwal pelatihan

tersebut berguna pada saat Dinas Perikanan Kota Dumai ingin melaksanakan kegiatan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pengunduran jadwal pelatihan dari jadwal yang telah ditetapkan.

PROGRAM 3 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan selanjutnya adalah program pengelolaan perikanan budidaya. Pagu anggaran pada program ini adalah sebesar Rp. 1.743.552.298,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.703.809.367,50 atau sebesar 97,72%. Program pengelolaan perikanan budidaya ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, dengan pagu anggaran adalah sebesar Rp. 690.953.879,- dengan realisasi anggaran Rp. 674.796.250,- atau sebesar 97,66%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sub kegiatan pengembangan kapasitas pembudidayaan ikan kecil dengan indikator kinerja jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 690.953.879,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 674.796.250,- atau sebesar 97,66%. Target indikator kinerja adalah sebanyak 10 kelompok dengan realisasi output sebanyak 10 kelompok atau 100%. Pada sub kegiatan ini dilakukan pemberian hibah kepada kelompok pembudidaya ikan binaan Dinas Perikanan Kota Dumai berupa sarana dan prasarana pembudidayaan ikan. 10 Kelompok tersebut telah melewati fase validasi sebelum penetapan kelompok penerima hibah. Pemberian hibah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bagi kelompok pembudidaya ikan.



Gambar 5. Serah Terima Hibah kepada Kelompok Pembudidaya Ikan
Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai

Dalam pelaksanaan sub kegiatan pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil, terdapat permasalahan yang dihadapi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak ada standar batas atas dan batas bawah terhadap pagu anggaran hibah. Hal ini mempersulit perangkat daerah terutama Dinas Perikanan Kota Dumai dalam menetapkan anggaran.
- 2) Tidak ada syarat khusus yang ditetapkan dalam menyeleksi calon kelompok penerima hibah.
- 3) Keterlambatan penyampaian laporan penggunaan hibah.

Dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, Dinas Perikanan Kota Dumai melakukan Langkah strategis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dinas Perikanan melakukan standar batas atas dan batas bawah terhadap pagu anggaran hibah. Karena pagu anggaran hibah sudah termasuk pada pagu indikatif rancangan awal renja.
- 2) Selain menetapkan pagu anggaran hibah, Dinas Perikanan harus selektif menyeleksi calon kelompok penerima hibah. Minimal memenuhi persyaratan penerima hibah.
- 3) Penyampaian laporan penggunaan hibah perlu disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kelompok terhadap hibah yang

diterima. Penyampaian laporan belanja hibah harus disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hibah diserahkan kepada kelompok penerima hibah. Penyampaian laporan ini harus didukung dengan surat pernyataan pertanggungjawaban bahwa hibah yang telah diterima digunakan sesuai dengan NPHD dan salinan bukti serah terima hibah.

2. Kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.052.598.419,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.029.013.117,50 atau sebesar 97,76%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 4 (empat) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sub kegiatan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja jumlah prasarna pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 526.531.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 509.990.162 atau sebesar 96,86%. Target indikator kinerja adalah sebanyak 1 (satu) unit den realisasi output sebanyak 1 (satu) unit. Pada sub kegiatan ini kegiatan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan sesuai dengan jadwal aliran kas.
 - b. Sub kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 200.539.119,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 198.609.000,- atau sebesar 99,04%. Target indikator kinerja adalah sebanyak 1 (satu) dokumen dengan realisasi output sebanyak 1 (satu) dokumen. Pada sub kegiatan ini dilakukan uji kualitas air dengan menggunakan alat ukur sederhana. Hasil uji tes tersebut menjadi dasar terkait kondisi perairan budidaya perikanan pada kelompok pembudidaya ikan. Selain kegiatan uji kualitas air untuk kesehatan ikan dan lingkungan, pada sub kegiatan ini juga dilakukan pelatihan

budikdamber kepada 80 KK yang beresiko stunting. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I tahun 2023. Tujuan dari pelatihan budikdamber adalah (1) untuk mencukupi gizi keluarga akan protein hewani, (2) solusi bagi keluarga untuk berbudidaya tanpa memikirkan lahan untuk berbudidaya, dan (3) meningkatkan pendapatan bagi keluarga beresiko stunting.



Gambar 6. Uji Kualitas Air Menggunakan Alat Ukur Sederhana
Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)



Gambar 7. Pelatihan Budikdamber Bagi Keluarga Beresiko Stunting
Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan sub kegiatan ini, terutama pada kegiatan rutin kesehatan ikan dan

lingkungan adalah (1) Kota Dumai tidak memiliki laboratorium untuk uji kualitas air, sehingga mempersulit para pembudidaya untuk melakukan uji kualitas air, (2) Karena laboratorium uji kualitas air berada di luar Kota Dumai, sampel air yang diambil mudah terkontaminasi sehingga mempengaruhi hasil uji lab, (3) tidak mempunyai SDM yang kompeten di bidangnya.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ada beberapa solusi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai, yaitu (1) pengadaan alat pengukur kualitas air sederhana, (2) teknik pengambilan sampel air dan tata cara penyimpanan sampel air sebelum dibawa ke laboratorium untuk di uji, (3) pelatihan dan pendampingan kepada penyuluh maupun pegawai dalam teknik pengambilan sampel dan pengujian sampel air dengan menggunakan alat ukur sederhana.

- c. Sub kegiatan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat dengan indikator kinerja jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 122.330.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 118.527.600,- atau sebesar 96,89%. Target indikator kinerja adalah sebesar 250 orang dengan realisasi output sebanyak 250 orang atau sebesar 100%. Sub kegiatan fokus kepada pembinaan dan pendampingan kelompok pembudidaya ikan.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan subkegiatan ini, yaitu (1) jauhnya lokasi pembinaan dan pendampingan, sehingga mempersulit penyuluh untuk melakukan pembinaan; (2) minimnya transportasi darat yang disediakan, (3) faktor cuaca, (4) kondisi jalan yang tidak bisa dilalui apabila memasuki musim penghujan.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, hal yang dilakukan adalah (1) membuat jadwal pembinaan dan pendampingan kelompok pembudidaya ikan, mengingat jarak yang tidak berdekatan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, (2) membuat perencanaan untuk

pengadaan transportasi darat untuk penyuluh, dan (3) membagi tugas penyuluh sesuai dengan wilayah/kecamatan



Gambar 8. Pembinaan dan Pendampingan pada Kelompok Pembudidaya Ikan
Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

- d. Sub kegiatan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di Darat dengan indikator kinerja luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dilindungi. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 203.197.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 201.886.355,50 atau sebesar 99,35%. Target indikator kinerja adalah sebanyak 1.050 Ha dengan realisasi output sebanyak 1.050 Ha. Pada sub kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan sub kegiatan.

PROGRAM 4 PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan selanjutnya adalah program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Pagu anggaran pada program ini adalah sebesar Rp. 74.999.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 74.983.300,- atau sebesar 99,98%. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industry pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, dengan pagu anggaran adalah sebesar Rp. 74.999.300,- dengan realisasi anggaran Rp. 74.983.300,- atau sebesar 99,98%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut
 - a. Sub kegiatan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Pagu anggaran adalah sebesar Rp. 74.999.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 74.983.300,- atau sebesar 99,98%. Target indikator kinerja adalah sebanyak 0,1 ton dengan realisasi output sebanyak 0,1 ton atau 100%. Pada sub kegiatan ini dilaksanakan kegiatan GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan). Adapun target dari kegiatan ini adalah anak PAUD/TK. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar anak usia sekolah mau untuk makan ikan, baik itu ikan segar maupun produk olahan ikan.



Gambar 9. Peringatan Hari Ikan Nasional di Kota Dumai Tahun 2023
Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)



Gambar 10. Sosialisasi GEMARIKAN di TK Bunda Kreatif
Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)



Gambar 11. Sosialisasi GEMARIKAN di TK Babul Khoiroh
Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

Untuk capaian program dan kegiatan urusan pilihan kelautan dan perikanan pada Dinas Perikanan Kota Dumai tahun anggaran 2023 dapat dijabarkan secara rinci pada Tabel 18 di bawah ini.

Tabel 18. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	6.024.608.581	5.769.386.784	95,76%			
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.919.000	76.894.600	99,97%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	76.919.000	76.894.600	99,97%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.084.263.500	2.866.798.145	92,95%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.084.263.500	2.866.798.145	92,95%	1. Terjadinya mutasi 2 orang pegawai ke PD lain 2. Terdapat 2 orang pegawai yang pensiun	Pencairan keuangan sesuai dengan jumlah pegawai	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	43.298.000	43.298.000	100%			
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	43.298.000	43.298.000	100%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	505.046.800	501.020.906	99,20%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.083.700	10.083.700	100%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	168.978.100	165.866.745	98,16%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.590.000	18.580.000	99,95%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.985.000	20.344.010	96,95%			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.720.000	6.585.000	97,99%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.690.000	279.561.451	99,95%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	501.108.206	497.521.936	99,28%			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.208.000	125.160.000	99,96%			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.194.000	148.180.000	98,01%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	24.824.270	24.300.000	97,89%			
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.881.936	199.881.936	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.229.976.769	1.202.095.953	97,73%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.535.000	2.530.000	99,96%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.600.000	178.039.797	90,56%	Ada 1 token listrik yang bermasalah dan dalam proses perbaikan	Melakukan perbaikan token listrik dan pencairan anggaran sesuai dengan kebutuhan pemakaian	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.030.841.769	1.021.526.156	99,10%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	583.996.306	581.757.244,07	99,62%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	141.832.800	140.700.830	99,20%			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.680.000	32.673.770	99,98%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	409.483.506	408.382.644,07	99,73%			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	213.726.500	206.674.265	96,70%			
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kab/Kota	213.726.500	206.674.265	96,70%			
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	213.726.500	206.674.265	96,70%			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.743.552.298	1.703.809.367,50	97,72%			
				Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	690.953.879	674.796.250	97,66%			
				Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	690.953.879	674.796.250	97,66%			
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.052.598.419	1.029.013.117,50	97,76%			
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	526.531.300	509.990.162	96,86%			
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	200.539.119	198.609.000	99,04%			
				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	122.330.500	118.527.600	96,89%			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	203.197.500	201.886.355,50	99,35%			
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	74.999.300	74.983.300	99.98%			
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	74.999.300	74.983.300	99.98%			
				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	74.999.300	74.983.300	99.98%			

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Adapun kebijakan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Dumai khususnya Dinas Perikanan Kota Dumai pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 19 di bawah ini.

Tabel 19. Kebijakan Strategis Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Pemberian hibah kepada kelompok pembudidaya ikan	Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya 2. Memberikan motivasi kepada kelompok pembudidaya ikan untuk dapat mengembangkan budidaya perikanan 3. Membekali pengetahuan dan teknologi baru kepada pembudidaya ikan 4. Terwujudnya intensifikasi budidaya perikanan
2.	Pemberdayaan nelayan kecil	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kepastian dalam berusaha berkelanjutan 2. Meningkatkan kemampuan usaha nelayan kecil 3. Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan nelayan kecil
3.	Perlindungan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha 2. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan 3. Meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kelembagaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil serta penguatan kelembagaan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan 4. Mewujudkan kemandirian nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik
4.	Sosialisasi GEMARIKAN	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kesadaran gizi masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan 2. Meningkatkan angka konsumsi ikan

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2023)

3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Sub bab ini menjelaskan tentang kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan dengan format/Tabel 20 di bawah ini.

Berdasarkan laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya, Dinas Perikanan Kota Dumai merupakan salah satu perangkat daerah yang tidak perlu untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kota Dumai tahun anggaran 2022.

Tabel 20. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kota Dumai Tahun Anggaran 2022

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	-	-	-

**BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN**

NIHIL

BAB V PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2023.

Berbagai informasi tentang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Kota Dumai Tahun 2023 yang dituangkan pada LKPJ Dinas Perikanan diharapkan dapat memberi jawaban mengenai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah. Namun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang pencapaian indikator kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai.

Demikianlan penyampaian LKPJ Dinas Perikanan Kota Dumai tahun anggaran 2023, dengan harapan besar LKPJ ini dapat menjadi media informasi kepada masyarakat, serta dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja ke depan lebih produktif, efektif dan efisien.

Dumai, 10 Januari 2024

Kepala Dinas Perikanan
Kota Dumai



M. HILAGAN, S.H., M.Si
NIP. 19720412 200112 1 003